

BAB III

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP RWANDA

Tindakan genosida merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, melakukan kerusakan fisik, maupun mental bagi anggota kelompok (Pratama, 2018).

Konflik yang terjadi di Rwanda merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya kecemburuan sosia maupun ketimpangan ekonomi antara etnis Hutu dan etnis Tutsi. Konflik dan memanasnya hubungan antara etnis Hutu dan etnis Tutsi dimulai sejak Rwanda dijajah oleh Belgia. Saat itu, Belgia membeda-bedakan suku Hutu, Tutsi dan suku Twa yang merupakan kelompok suku kecil di Rwanda. Sebagai suku minoritas, Belgia menjadikan etnis Tutsi untuk memerintah. Belgia memilih etnis Tutsi karena secara fisik etnis Tutsi terlihat lebih 'Eropa' untuk mereka (Jatmika, 2016).

Genosida Rwanda merupakan sebuah pembantaian terhadap etnis Tutsi yang dilakukan oleh Ekstremis Hutu sebagai etnis mayoritas yang terjadi selama 100 hari di Rwanda pada tahun 1994. Meskipun Hutu merupakan etnis mayoritas, namun etnis Tutsi telah lama mendominasi bahkan banyak yang

menduduki sektor-sektor kepemimpinan dan pemerintahan di negara itu.

Rwanda sendiri merupakan salah satu negara terpadat di Afrika Tengah yang memiliki penduduk sebanyak 7,4 juta jiwa. Ada tiga etnis di negara ini, yaitu Hutu yang merupakan etnis mayoritas, sedangkan Tutsi adalah minoritas namun dominan dalam sekret pemerintahan di Rwanda, serta Twa yang merupakan keturunan pertama di Rwanda yang tinggal terpencil di hutan. Negara ini berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Burundi dan Kongo (Politik, 2019).

Antara April hingga Juli 1994, ratusan ribu orang Rwanda terbunuh dalam sebuah konflik genosida. Para pembunuh menggunakan alat-alat sederhana seperti parang, pentung maupun benda tumpul lainnya. Selain itu pembunuhan juga dilakukan dengan cara menggiring beberapa orang ke dalam bangunan dan membakar mereka hidup-hidup (Epstein H. C., 2017).



Gambar 3. 1 Peta Rwanda. Sumber: *Democratic Transition in Post Conflict Society Project*

A. Awal Mula Konflik Genosida Rwanda

Konflik Genosida Rwanda dimulai setelah Hutu berhasil menggulingkan monarki Tutsi pada tahun 1959. Tentara pemberontak RPF mewakili pengungsi Tutsi yang melarikan diri dari negara mereka pada awal tahun 1960. Selama berabad-abad sebelumnya, mereka telah membentuk kasta elit minoritas di Rwanda. Dalam sebuah system yang berlanjut di bawah kolonialisme Belgia, mereka memperlakukan para petani Hutu seperti budak, memaksa mereka untuk bekerja di tanah mereka. Kemarahan etnis Hutu membara hingga kemerdekaan pada tahun 1962 terhadap etnis Tutsi hingga melarikan diri ke negara tetangga (Epstein H. C., 2017).

Puluhan ribu etnis Tutsi melarikan diri ke negara tetangga. Selama tahun 1960-an, para pengungsi Tutsi di Uganda sesekali melakukan serangan melewati perbatasan. Setiap serangan memicu pembalasan terhadap orang Tutsi yang berada di Rwanda berupa penangkapan, penyiksaan, hingga dibunuh. Beberapa generasi baru dari Tutsi membentuk aliansi dengan Tutsi Uganda, sebagian besar merupakan pendukung oposisi dan dipandang sebagai musuh presiden Uganda pada saat itu yaitu Milton Obete yang memerintah Uganda pada periode 1960 dan periode 1980.

Pada masa pemerintahan Obete tahun 1980-an, ia meninggalkan hak-hak sipil Rwanda dan memerintahkan para pengungsi untuk kembali ke Rwanda. Bagi mereka yang

menolak maka akan diserang, diperkosa, dibunuh, bahkan rumah-rumah mereka dihancurkan.

Menanggapi pelanggaran Obete, semakin banyak pengungsi Rwanda bergabung dengan kelompok pemberontakan anti Obete yang didirikan Museveni pada tahun 1981 dan berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1986. Sebagian besar merupakan pengungsi Tutsi Rwanda yang diberikan pangkat tinggi di pasukan baru oleh Museveni.

Para pengungsi Rwanda di Uganda menyebabkan etnis Hutu di Rwanda khawatir akan serangan Tutsi. Pada tahun 1972, sekitar 75ribu etnis Hutu yang berada di Burundi telah dibantai atas perintah dari orang Tutsi.

Semenjak Museveni mengambil alih kekuasaan, para pengungsi Tutsi menjadi perhatian pihak Barat yang mendesak pemerintah Rwanda untuk menigizinkan para pengungsi kembali. Namun hal ini ditolak oleh Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana yang menyebabkan para pengungsi Tutsi di Uganda ingin menggulingkan pemerintah Habyarimana serta mengambil alih Rwanda dengan paksa. Museveni kemudian memberitahukan hal ini kepada Habyarimana. Habyarimana menyatakan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa dirinya khawatir akan invasi pengungsi Tutsi dari Uganda (Epstein H. C., 2017).

Tidak berselang lama setelah kesepakatan damai disetujui, pada April 1994, Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana serta

rekannya yang merupakan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryimira yang merupakan etnis Hutu tewas menjadi korban penembakan saat sedang berada di pesawat terbang. Para Ekstremis Hutu menyalahkan RPF yang merupakan pemberontak Rwanda sebagai pelaku penembakan pesawat tersebut. (Firman, 2017)

Setelah pembunuhan presiden Hutu di Rwanda, para pejabat Amerika Serikat berada sudah melihat niat pelaku untuk menargetkan Tutsi. Joyce Leader, kepala Kedutaan Besar Amerika Serikat di Rwanda, melaporkan pada 8 April 1994 bahwa ada target tertentu kekerasan terjadi. (Power, 2003)

Terbunuhnya Presiden Juvenal Habyarimana serta rekannya yang merupakan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryimira menjadi pemicu pembantaian etnis Tutsi yang dimulai pada 7 April 1994. Ekstremis Hutu menyiarkan kebencian melalui stasiun radio dan koran untuk menyingkirkan para kaum Tutsi. Nama-nama mereka yang akan dibunuh dibacakan melalui siaran ini. (Firman, 2017).

Peristiwa kematian Presiden Habyarimana menjadi momentum bagi ekstremis Hutu. Dengan terbunuhnya Presiden Habyarimana, pembantaian etnis Tutsi oleh etnis Hutu dimulai. Pembantaian dipermudah dengan adanya diskriminasi yang dibentuk saat Hutu berkuasa, yaitu bagi kartu identitasnya yang menunjukkan etnis Tutsi maka akan dapat kesulitan dalam pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Para etnis Hutu

memblok setiap jalan, memeriksa orang-orang yang lewat dan membunuh setiap Tutsi yang mereka temukan (Jatmika, 2016).

Tiga setengah tahun sebelum konflik genosida Rwanda, pasukan pemberontak yang sebagian besar merupakan orang Tutsi yang dikenal dengan Front Patriotik Rwanda (FPR) telah menyerbu Rwanda dan mendirikan kamp di pegunungan utara. Mereka telah dipersenjatai dan dilatih oleh tentara Uganda yang kerap kali memasok senjata selama perang saudara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB maupun berbagai perjanjian damai (Epstein H. C., 2017).

Berkat bantuan Uganda, pada akhirnya FPR yang terorganisir dengan baik para berhasil membuat orang Hutu baik warga sipil yang terlibat aksi genosida berbalik melarikan diri hingga melintasi perbatasan Kongo. Selain itu, FPR juga berhasil merebut wilayah hingga sampai di ibukota Rwanda secara bertahap (Firman, 2017).

Bantuan Uganda terhadap Tutsi berawal dari Yoweri Museveni yang merupakan oposisi dari Presiden Uganda, Milton Obote yang memerintah pada 1960-an dan awal 1980-an. Para pengungsi Tutsi Rwanda ini membentuk aliansi terkait pendukung oposisi dan bergabung dengan Tentara Perlawanan Nasional yang didirikan oleh Museveni sebagai kelompok pemberontak anti-Obotei. Kemudian setelah kelompok pemberontak ini berhasil dan membawa Museveni mengambil alih kekuasaan, Museveni memberikan pangkat yang tinggi di

pasukan baru Uganda kepada para pengungsi Tutsi Rwanda. (Epstein H. C., 2017)

Pada masa itu Museveni menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Museveni kerap terpengaruh dengan Amerika Serikat dalam urusan internal Uganda itu sendiri termasuk dalam memberi bantuan alokasi militer (Hasan, 2017).



Gambar 3 2. Peta perbatasan Rwanda. Sumber <https://www.re-tawon.com/2013/03/rwanda-negara-mini-yang-menjadi-arena.html>

B. Respon Amerika Serikat

Berawal dari pertemuan antara Amerika Serikat dengan presiden Uganda, Museveni pada tahun 1990 di Washington. Pada saat itu tengah terjadi perselisihan antara etnis Hutu dengan etnis Tutsi yang membentuk Front Patriotik Rwanda (FPR) di Rwanda yang mana tantara Uganda juga terlibat dan

berkumpul di dekat perbatasan Rwanda-Uganda. Museveni menemui kepala Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Afrika, Herman Cohen untuk menyatakan janji bahwa Museveni akan menindaklanjuti para pemberontak Rwanda (Hasan A. M., 2017).

Selama periode konflik genosida, para pejabat kedutaan besar Amerika Serikat mengetahui bahwa senjata telah melintasi perbatasan. Selain itu CIA juga tahu bahwa kekuatan militer pemberontak yang meningkat mengakibatkan peningkatan ketegangan etnis di Rwanda hingga menyebabkan meluasnya korban jiwa.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemberontakan tersebut mendapatkan bantuan dari Uganda. Amerika Serikat mengabaikan bantuan Uganda tersebut, namun tetap memberikan bantuan militer dan pembangunan untuk Presiden Uganda yang kemudian memanggilnya sebagai pembawa kedamaian (Epstein H. C., 2017)

Pada Mei 1995, sebuah tim *Center for Development Information and Evaluation* (CDIE) dari *US Agency for International Development* (USAID) mengunjungi Rwanda untuk penilaian langsung dari bantuan internasional untuk negara tersebut setelah perang sipil.

Membantu korban perang, merehabilitasi dan merekonstruksi masyarakat merupakan proses yang rumit, secara politis membutuhkan komitmen finansial yang besar dan

koherensi terprogram dari masyarakat internasional. Sejak April 1994 hingga akhir tahun, komunitas internasional mengarahkan upaya sebagian besar untuk menyelamatkan korban dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, layanan medis, serta sanitasi untuk para korban. Bantuan makanan darurat telah terlaksana dan semakin meluas. Hal ini telah mencegah kelaparan maupun kekurangan gizi dalam skala besar.

Pada September 1994, perhatian bantuan mulai bergeser ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi karena beberapa komunitas internasional telah memahami besarnya kehancuran. Setelah beberapa tahun berlalu, tingkat bantuan meningkat menjadi lebih dari 1 Milyar USD. Amerika Serikat melalui USAID, sebagian besar telah menjadi penyedia utama dana dan sumber daya lainnya (Kumar, 1996).

Dalam pidatonya pada tahun 1998, Presiden Bill Clinton menyatakan penyesalannya karena tidak melakukan intervensi lebih keras dalam mengakhiri pembunuhan massal pada tahun 1994. Pernyataan tersebut dapat dikatakan untuk mengatur suatu hubungan yang ditentukan karena rasa bersalah para pembuat kebijakan Amerika Serikat tentang genosida.

Dukungan Amerika Serikat untuk pemerintah yang dipimpin oleh RPF terus berlanjut. Secara berturut-turut administrasi dan lintas garis partisan dengan pejabat eksekutif dan Kongres bekerjasama dalam memberikan bantuan

substansial untuk mendukung upaya pembangunan Rwanda dan penyebaran pasukan perdamaian.

Namun selama beberapa dekade terakhir, para pejabat eksekutif dan Kongres semakin mengkritik keterlibatan Rwanda dalam konflik regional dan menyatakan keprihatinan dengan kondisi politik dan hak asasi manusia domestiknya (Arieff, 2019).

C. Intervensi Amerika Serikat terhadap Rwanda

Selama bertahun-tahun Rwanda telah menerima sejumlah besar bantuan asing terhadap populasi maupun ekonomi. Penerimaan bantuan tahunan sejak 1985 hingga 1991 berjumlah sekitar 238 juta USD. Pada tahun 1991, bantuan pembangunan resmi per kapita hamper mencapai lima kali lipat dibandingkan dengan penghasilan negara-negara yang relatif rendah. Sejak tahun 1980 hingga 1992, pengembangan per kapita bantuan tumbuh menjadi 60%. Bantuan pembangunan tumbuh hamper seperempat produksi domestik bruto 1992 (Bank, 1994).

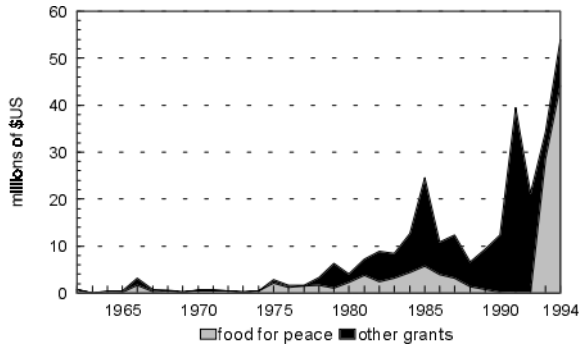
1. Intervensi Kemanusiaan Sebelum Genosida

Pertumbuhan bantuan pembangunan di periode sebelumnya mencerminkan konsensus bahwa Rwanda memiliki prioritas pembangunan yang tepat dan kemampuan untuk menyerap sumber daya yang diberikan maupun yang dipinjamkan. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an bantuan dalam jumlah besar

yang diberikan memiliki tujuan agar ekonomi Rwanda tetap bertahan untuk mengatasi dampak guncangan eksternal seperti penurunan harga dunia dalam ekspor serta untuk membantu pemerintahan melewati periode structural pengaturan.

Mitra pembangunan utama Rwanda secara tradisional adalah Belgia, Perancis dan Jerman. Kontribusi USAID sendiri telah muncul selama bertahun-tahun. Tujuan program USAID di Rwanda sebelum konflik adalah untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhan ekonomi partisipatif dengan mengurangi tingkat pertumbuhan populasi, meningkatkan pendapatan riil di sektor swasta dan meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis.

USAID berharap untuk memperlambat pertumbuhan populasi melalui peningkatan penggunaan praktik kontrasepsi modern. Peningkatan akuntabilitas dan sosial, serta peningkatan hasil komersial oleh usaha kecil menengah dan perternakan. Peningkatan besar dalam bantuan USAID kepada pemerintah dimulai pada tahun 1989 hingga 1993 yang sebagian besar bertujuan untuk memfasilitasi penyesuaian struktural (Arieff, 2019).



Grafik 3 Hibah USAID terhadap Genosida Rwanda (1962-1994)
 Sumber: *US Overseas Loans and Grants: Series of Yearly Data: Volume IV, 1994. Agency for International Development.*

2. Intervensi Kemanusiaan Pasca Genosida

Sejak April 1994 hingga akhir tahun, sebagian besar upaya komunitas internasional diarahkan untuk menyelamatkan hidup dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, bantuan medis dan layanan sanitasi untuk para korban. Sebagian besar bantuan berupa makanan darurat disediakan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bantuan tersebut telah mencegah kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar.

Dari berbagai metode pembiayaan yang digunakan, tidak ada konsensus tentang nilai total sumber daya yang digunakan dalam menanggapi krisis Rwanda. Meskipun demikian, hibah maupun bantuan lain yang dilaporkan UN *Department of Humanitarian Affairs*, lebih dari 1 milyar USD telah dikeluarkan selama tahun 1994 bahkan lebih dari 2 milyar USD pada 1995.

Perhatian mulai bergeser ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi pada akhir September 1994 ketika beberapa komunitas internasional menyadari akan kerusakan yang diakibatkan genosida. Sejak saat itu PBB dan lembaga bantuan telah mendukung beragam proyek dan program di berbagai sektor dan wilayah di seluruh negara. Selama satu tahun mengalami krisis, sekitar 130 organisasi non-pemerintah (NGO) telah diwakili di Rwanda pada Mei 1995. Bagaimanapun hubungan antara NGO dan pemerintahan Rwanda telah ditandai oleh kewaspadaan, berbatasan dengan kecurigaan dan permusuhan dalam beberapa kasus. Pada Desember 1995, 38 NGO diusir dan 18 kegiatan mereka ditanggguhkan sambil menunggu negosiasi lebih lanjut. Sejumlah 102 NGO tetap beroperasi.

Senilai 200 juta USD *World Bank Emergency Recovery Program* termasuk di antara inisiatif pertama yang secara khusus ditujukan untuk rekonstruksi. Termasuk juga 50 juta USD kredit pemulih darurat untuk sektor swasta penilaian kebutuhan dan rehabilitasi. Pada akhir 1995, dana langsung ke pemerintah atas kredit ini belum dicairkan. Bantuan untuk sektor swasta telah dirilis dan ketentuan kredit memungkinkan beberapa penggantian biaya yang dikeluarkan kembali November 1994.

Selain itu, UNDP merancang rehabilitasi dan Program Reintegrasi di Rwanda pada akhir 1994. Tujuannya adalah

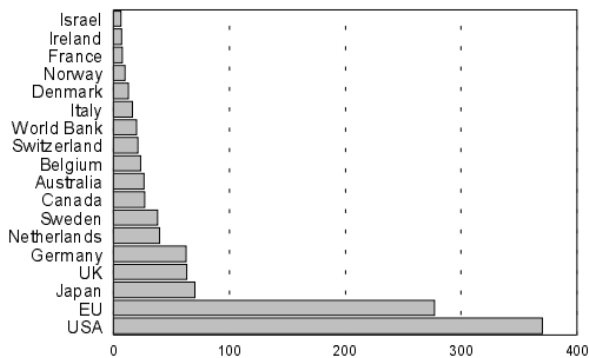
memobilisasi sumber daya untuk proyek skala kecil dalam membangun infrastruktur dan menghasilkan pendapatan. *The UN Assistance Mission to Rwanda* juga mengajukan sebuah rencana normalisasi komprehensif yang mengidentifikasi bidang-bidang prioritas dalam infrastruktur, layanan penting dan kebutuhan ekonomi sosial yang vital. Selain itu, *Secretary General's Trust Fund for Rwanda* yang didirikan pada Juli 1994 untuk bantuan darurat, dana perwalian kedua ialah didirikan oleh UNDP atas permintaan bantuan pada November 1994 untuk mempercepat pencairan dana rehabilitasi. Sebagian besar dana ini telah digunakan untuk penyediaan dukungan administrasi kepada pemerintah, merehabilitasi system peradilan dan memperbarui kota Kigali.

Badan Antar Konsolidasi PBB Banding (*The UN Consolidated Inter-Agency Appeal*, yang selanjutnya disebut Banding) pada Januari 1995, sementara yang pada dasarnya masih sebuah program bantuan darurat, memiliki rehabilitasi bekerja sampai pertengahan tahun itu didanai melalui Banding. Agen-agen paling erat terkait dengan rehabilitasi dan kegiatan rekontruksi dalam Banding telah menjadi *Food and Agricultural Organization*, UNHCR, UNICEF dan *World Food Program*.

Pasca kejadian darurat yang paling krisis dalam bantuan internasional adalah UNDP yang disponsori pada Januari 1995 oleh *Roundtable Pledging Conference for Rwanda*

Reconstruction. Telah dibagikan kerangka kerja berupa bantuan rehabilitasi dan rekontruksi telah diselenggarakan seperti yang dirumuskan pada konferensi dan tercatat dalam dokumen yang disebut sebagai Program Pemulihan Rwanda.

Table di bawah ini menyajikan jumlah bantuan yang diminta oleh pemerintah pada Januari 1995, jumlahnya dicairkan hingga September 1995. Seperti yang terlihat dalam table, dukungan dari Program Pemulihan Rwanda telah substantial. Dari tahun ke tahun tingkat bantuan yang dijanjikan tumbuh lebih dari 1 Milyar USD. Amerika Serikat melalui USAID sebagian besar telah menjadi penyedia utama dana dan sumber dana lainnya melalui meja bundar dan Banding.



Grafik 3 2 Pengeluaran untuk Krisis Rwanda (dalam juta dolar).

Sumber: UN Department of Humanitarian Affairs, *Financial Tracking System 1995*

D. Hambatan dan Permasalahan

Konflik genosida yang dialami oleh Rwanda menjadi perhatian banyak pihak di dunia internasional, salah satunya

Amerika Serikat. Dari beberapa bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak di dunia internasional, tidak semuanya berjalan tanpa hambatan. Setiap bantuan yang disalurkan untuk Rwanda memiliki beberapa hambatan seperti masalah pencairan dana maupun hambatan dalam mendistribusi bantuan. Beberapa hambatan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tertundanya Pencairan dari Dana yang Dijanjikan

Pencairan bantuan darurat ke Rwanda melalui PBB dan NGO sebelumnya relatif cepat. Akan tetapi para pemberi bantuan terlambat memberikan bantuan kepada pemerintah untuk pemulihan nasional. Kurang dari 10 persen dari jumlah yang dijanjikan telah dicairkan hampir setengah tahun. Situasi ini mulai membaik secara substansial menjelang akhir tahun. Sembilan bulan dari perjanjian konferensi, sekitar 245 juta USD (sepertiga dari dana yang telah dijanjikan) telah dicairkan. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana ini ialah:

- Bantuan langsung dari donor yang ditangguhkan karena menentang kekuatan pemerintah yang berlebihan yang digunakan dalam penutupan kamp, khususnya di Kibeho.
- Prosedur yang dapat diambil dari satu tahun ke dua tahun untuk merancang, menilai dan menyetujui proyek pengembangan

- Kondisi implisit dan eksplisit oleh beberapa donor atas bantuan yang dimiliki memengaruhi kecepatan dana yang dilepaskan
- Kapasitas daya serap terbatas dari pemerintah dan keengganan untuk menerima bantuan teknis asing
- Kekhawatiran yang masuk akal tentang politik legitimasi dan daya tahan pemerintahan yang baru membuatnya sulit untuk mencairkan dana secara langsung.

Secara keseluruhan, terlepas dari penyebabnya, keterlambatan dalam pencairan dana merusak kemampuan pemerintah untuk mengejar inisiatif tepat waktu untuk pemulihan ekonomi dan stabilitas politik (Arieff, 2019).

	Requested ^a	Pledged ^b May 1995	Committed Sept. 1995	Disbursed Sept. 1995
Financial support	189.6	186.2	111.2	50.1
Repatriation and reintegration	273.7	65.6	42.7	25.5
Rehabitation and reconstruction	300.9	314.2	284.5	94.1
Outside roundtable process and unallocated ^c	0.0	141.3	84.6	75.3
Total	764.2	707.3	523.1	245.1

^aRequested in January 1995 by the government through the Rwanda Recovery Program.
^bPledged amounts, as revised after the conference; committed and disbursed amounts as per UNDP/Rwanda Ministry of Plan document, "Donors Contributions for Rwanda Since Geneva Roundtable Conference," facsimile copy received 26 September 1995.
^cFunds not matching Rwanda Recovery Program or unallocated within the subprograms.

Tabel 3 I Roundtable Conference: Financial tracking. Sumber: Jurnal Rwanda: In Brief

2. Penjatahan Tidak Proporsional dalam Bantuan

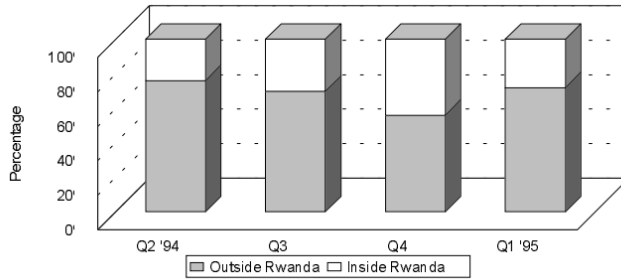
Lebih dari 2 Milyar USD dihabiskan untuk krisis Rwanda sejak April 1994, porsi yang jauh lebih besar ialah

untuk pemeliharaan korban di negara-negara suaka. Uni Eropa memperkirakan bahwa pada Mei 1995 menghabiskan 400 ribu USD per hari untuk memelihara kamp pengungsi.

Tabel di bawah ini menunjukkan alokasi hibah triwulanan serta penggunaan dana untuk bantuan kemanusiaan yang berkaitan dengan krisis untuk periode satu tahun dari April 1994 hingga Maret 1995. Seperti yang telah ditunjukkan dalam tabel berikut, sekitar dua per tiga dari jumlah bantuan, bantuan darurat dan rehabilitasi disediakan di luar Rwanda. Selanjutnya hanya sekitar 11 persen dari hibah ini sekitar sembilan pemberi bantuan yang selama satu tahun diberikan secara khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tindakan kotor seperti ini tidak bisa memberikan gambaran lengkap, akan tetapi mereka menyarankan sebuah tanggapan tidak proporsional, terutama dari krisis korban Rwanda. Alokasi yang tidak proporsional tersebut bisa dimengerti, meski sulit dibenarkan. Meskipun ada upaya dari beberapa pemberi bantuan lebih peduli terhadap para korban yang selamat dari genosida. Selanjutnya kamp para pengungsi yang sepenuhnya tergantung pada bantuan internasional menimbulkan ancaman keamanan yang serius. Hal ini dikarenakan mereka banyak dipersenjatai dari luar negeri. Selain itu, peningkatan pengeluaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempromosikan ekonomi pertumbuhan dan

rekonsiliasi sosial dapat memberikan dorongan untuk beberapa korban kembali ke rumah mereka (Arieff, 2019).



Grafik 3 3 Alokasi hibah untuk krisis Rwanda (April 1994-Maret 1995). Sumber: Calculations from financial information.